

BAB V

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kekuatan politik lokal, struktur organisasi, serta kepemimpinan aktif Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) khususnya di PC FSP KEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi sangat vital dalam membangun solidaritas kolektif dan meningkatkan efektivitas advokasi buruh. Solidaritas tersebut tercermin dalam dukungan konkret organisasi selama proses negosiasi, pendampingan hukum, dan perlindungan terhadap anggota yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan, seperti dalam kasus PHK massal di PT. Flexi Components. Meski demikian, serikat pekerja masih menghadapi sejumlah hambatan internal, antara lain koordinasi yang kurang optimal, rendahnya kesabaran anggota, serta potensi konflik di dalam organisasi, yang dapat mengurangi kekuatan kolektif. Dari sisi eksternal, tantangan utama meliputi praktek union busting oleh perusahaan, kebijakan PHK sepihak, serta komunikasi yang tidak efektif antara pekerja dan manajemen, yang sering kali berujung pada aksi mogok dan ketidakpastian nasib pekerja. Kondisi ini menuntut adanya advokasi hukum yang profesional dan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat, lembaga hukum, dan pemerintah sebagai penengah. (S. S. , 2022)

Strategi utama yang dijalankan SPSI dan terbukti berhasil meliputi penguatan solidaritas, kolaborasi dengan berbagai pihak, pengambilan keputusan secara partisipatif, serta peningkatan pemahaman hukum di kalangan anggota. Keterlibatan anggota dalam aksi kolektif memperkuat koordinasi advokasi, sementara edukasi hukum mendorong keberanian anggota dalam menuntut hak-hak normatif secara bersama-sama. Kolaborasi antara serikat, pemerintah, dan lembaga terkait juga berperan penting dalam memperkuat posisi tawar pekerja serta menciptakan perlindungan hak yang lebih optimal di tingkat lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan gerakan buruh sangat dipengaruhi oleh kekuatan solidaritas internal, strategi advokasi hukum yang sistematis, kerjasama lintas sektor, serta literasi hukum yang memadai. Untuk

menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan, dibutuhkan tata kelola organisasi yang profesional dan partisipatif, perlindungan hukum yang kuat dari negara, serta mekanisme komunikasi dan negosiasi yang transparan antara pekerja dan perusahaan. Temuan ini sejalan dengan teori konflik klasik dan hasil penelitian sebelumnya, serta menyoroti pentingnya literasi hukum dan kekuatan kolektif dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja. (A., 2003)

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam gerakan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam upayanya menyelesaikan sengketa buruh di PT. Flexi Components di Kabupaten Bekasi, dengan menyoroti dinamika, tantangan, dan dampak strategi kolektif yang dilakukan oleh serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gerakan Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam menyelesaikan sengketa buruh di PT. Flexi Components di Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan beberapa poin utama yang menyoroti rumusan masalah penelitian ini. Pertama, dampak kekuatan politik lokal terhadap strategi, tujuan, dan efektivitas gerakan SPSI sangat signifikan dalam membentuk solidaritas dan kekuatan kolektif pekerja. Keterlibatan nyata dari struktur kepengurusan, aksi advokasi, hingga penggunaan jalur hukum membuktikan bahwa SPSI di level kabupaten/kota mampu menjadi pondasi utama pembelaan hak-hak anggota di tengah tekanan industri. Dukungan yang diberikan tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga diwujudkan melalui aksi negosiasi aktif, pendampingan hukum yang terstruktur, dan koordinasi yang terukur antara pengurus dan anggota, sehingga hak-hak pekerja dapat diperjuangkan secara adil dan proporsional melalui mekanisme organisasi yang solid dan profesional. Kedua, tantangan internal dan eksternal yang dihadapi SPSI dalam menjalankan perannya di PT. Flexi Components muncul dalam bentuk perpecahan, lemahnya koordinasi internal, serta praktek union busting yang dilakukan perusahaan. Kurangnya kesabaran anggota dan minimnya koordinasi menyebabkan pengambilan keputusan strategis yang kurang optimal, seperti aksi mogok kerja yang tidak melalui prosedur konsultasi dan musyawarah, sehingga berdampak pada kerugian besar bagi anggota berupa pemutusan hubungan kerja massal. Tantangan eksternal juga kian nyata dengan adanya sikap represif dan pelarangan aktivitas serikat oleh

perusahaan, yang tidak hanya menghadirkan tekanan sosial dan psikologis, tetapi juga menurunkan daya tawar pekerja secara institusional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan industrial di lingkungan PT. Flexi Components masih diwarnai dengan ketimpangan, yang memerlukan penguatan komunikasi, sinergi, serta keteladanan kepemimpinan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Ketiga, keterlibatan anggota dalam setiap aksi maupun rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh SPSI terbukti mempengaruhi secara langsung keberhasilan gerakan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Partisipasi aktif ribuan anggota, kolaborasi lintas organisasi dan perusahaan lain, serta dukungan masyarakat dan pemerintah, menjadi modal utama dalam menggalang solidaritas dan memperkuat posisi tawar pekerja di hadapan manajemen perusahaan. Proses penyelesaian sengketa dan advokasi yang dilakukan SPSI berjalan secara kolektif-multipihak, dengan strategi negosiasi, aksi demonstrasi, dan pelibatan instansi pemerintah, sehingga menghasilkan solusi yang lebih proporsional bagi pekerja terdampak. Tidak hanya itu, adanya peningkatan literasi hukum dan budaya konsultasi di kalangan anggota menjadikan pengambilan keputusan maupun langkah advokasi mampu dilakukan secara cermat, konsisten, dan terintegrasi, sehingga hak-hak normatif pekerja dapat dipertahankan dan diperjuangkan secara berkesinambungan. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan gerakan buruh di lingkungan PT. Flexi Components pada dasarnya sangat bergantung pada sejauh mana keterlibatan anggota, kekuatan kolektif, serta kolaborasi harmonis antara serikat, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. (S. S. , 2022)

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting baik secara praktis maupun teoritis dalam konteks gerakan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di PT. Flexi Components Kabupaten Bekasi. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif organisasi serikat pekerja dalam proses advokasi, mediasi, dan pendampingan anggota menjadi faktor fundamental yang mampu meningkatkan solidaritas kolektif dan memperkuat posisi tawar pekerja di hadapan manajemen perusahaan. Hal ini berarti, ke depan, serikat pekerja harus semakin memperkuat mekanisme koordinasi internal, pengembangan literasi hukum anggota, serta memperkuat

jejaring kolaborasi lintas lembaga dan pemerintahan guna memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Model sinergi antara serikat, pemerintah, dan lembaga terkait yang terbangun dalam penyelesaian sengketa di PT. Flexi Components dapat menjadi contoh nyata bagi organisasi pekerja di sektor industri lain untuk mengadopsi pendekatan advokasi multi pihak, terutama dalam menghadapi konflik ketenagakerjaan yang kompleks dan berisiko menimbulkan PHK massal. Secara teoritis, penelitian ini mendukung relevansi teori konflik dalam menganalisis dinamika hubungan industrial, di mana ketegangan dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan manajemen merupakan sumber utama lahirnya resistensi pekerja dan berkembangnya solidaritas organisasi. Temuan mengenai pentingnya peningkatan literasi hukum serta pola advokasi berbasis kolektif menegaskan bahwa empowerment anggota serikat menjadi salah satu kunci kemajuan gerakan buruh ke depan. Penelitian ini juga memperkaya khazanah studi hubungan industrial khususnya di Indonesia, dengan menegaskan bahwa penerapan strategi negosiasi multi pihak, pendekatan dialog sosial, dan konsolidasi kekuatan kolektif mampu meminimalisir resiko konflik berkepanjangan, serta mendorong resolve yang berpihak pada prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja. Dengan demikian, baik secara praktis maupun teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan, pengurus serikat pekerja, serta kalangan akademisi dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan pengembangan kapasitas organisasi untuk mendorong terciptanya hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkelanjutan. (A. F. B., 2021)

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai gerakan buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dalam menyelesaikan sengketa buruh di PT. Flexi Components di Kabupaten Bekasi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil maupun kedalaman analisis yang disajikan. Salah satu kekurangan utama terletak pada aspek subjektivitas peneliti. Sebagai manusia, peneliti memiliki sudut pandang, pengalaman, serta preferensi tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dalam proses pengumpulan data, interpretasi temuan, maupun penyusunan narasi penelitian. Subjektivitas ini berpotensi mempengaruhi penilaian peneliti terhadap dinamika di lapangan, khususnya ketika harus memilih atau menafsirkan data yang kadang bersifat

multifaset dan kompleks. Subjektivitas peneliti juga tercermin dalam penentuan fokus pada isu-isu tertentu yang dianggap paling relevan atau penting, sehingga terdapat kemungkinan adanya pengabaian atas aspek lain yang sebenarnya juga memiliki signifikansi di dalam praktik gerakan buruh, namun tidak memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Keterbatasan ini dapat berdampak pada terbatasnya ruang eksplorasi terhadap dinamika yang lebih luas atau pada nuansa-nuansa sosial yang hanya dapat diselami melalui pendekatan yang lebih lintas perspektif. Di samping itu, dalam pelaksanaan wawancara dan observasi, peneliti mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih menonjolkan data yang sesuai dengan hipotesis atau pemahaman awal, sehingga sebagian data lain yang kontradiktif atau berpotensi menambah variasi interpretasi tidak terakomodasi secara optimal. (SPSI, 2022)

Menyadari adanya kekurangan tersebut, peneliti berusaha untuk tetap menjaga objektivitas dengan melakukan triangulasi data, baik melalui berbagai teknik pengumpulan data maupun lintas sumber narasumber. Namun, sepenuhnya menghilangkan bias subjektivitas adalah hal yang sangat menantang, terlebih dalam penelitian yang sangat kental dengan dinamika sosial dan hubungan antar aktor yang memiliki kepentingan tersendiri. Oleh sebab itu, bagian ini diharapkan dapat menjadi catatan penting bagi pembaca untuk menempatkan hasil penelitian ini secara proporsional, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut yang mampu mengelola, mengurangi, atau meminimalisir pengaruh subjektivitas peneliti dalam seluruh proses ilmiah yang berlangsung.

SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang telah diakui dalam penelitian ini, khususnya adanya unsur subjektivitas peneliti dalam menganalisis dinamika gerakan buruh dan penyelesaian sengketa di lingkungan PC FSP KEP SPSI Kabupaten Bekasi, maka disarankan kepada peneliti di masa mendatang untuk memperluas pendekatan metodologis yang digunakan. Pemanfaatan teknik triangulasi yang lebih beragam, seperti perpaduan metode observasi partisipatif, survei kuantitatif, serta analisis dokumen kebijakan yang relevan sangat dianjurkan agar mampu menghadirkan sudut pandang yang lebih komprehensif dan objektif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan informan kunci yang lebih bervariasi, tidak hanya dari unsur serikat pekerja ataupun anggota terdampak, tetapi juga perwakilan perusahaan, aparat pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan, serta lembaga advokasi independen sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman atas konteks hubungan industrial yang terjadi. Peneliti masa mendatang juga dapat mempertimbangkan kajian komparatif lintas wilayah atau sektor industri lainnya agar diperoleh gambaran yang semakin luas tentang pola-pola advokasi serikat pekerja dan proses penyelesaian konflik hubungan industrial di berbagai kondisi sosial ekonomi. Dengan langkah ini, hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya lebih valid secara akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja di Indonesia.

